



PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH ACEH

TAHUN 2023



BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH ACEH 2023



GUBERNUR ACEH

Nomor : 065/2129
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : *Penyampaian Dokumen
Perjanjian Kinerja Pemerintah
Aceh Tahun 2023.*

Banda Aceh, 06 Februari 2023
15 Rajab 1444

Yang Terhormat,

Presiden Republik Indonesia
u.p. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia

di-

J a k a r t a

1. Memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terlampir kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 yang merupakan salah satu dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).
2. Demikian kami sampaikan, terima kasih.



Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia



GUBERNUR ACEH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACHMAD MARZUKI**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR ACEH**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Banda Aceh, Februari 2023

Pj. GUBERNUR ACEH, *h.*

Achmad Marzuki
ACHMAD MARZUKI

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2023**

No	TUJUAN	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)		(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	1.1	Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh, Laki-Laki dan Perempuan, serta Peran Lembaga Demokrasi	Skor Aspek Hak-Hak Politik Skor Aspek Lembaga Demokrasi	65,00 75,00
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	2.1	Mempertahankan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan pada Level WTP	Opini BPK	WTP
		2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,8000/Tinggi
		2.3	Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	2
		2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	65
		2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	77,5
		2.6	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,32%
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	3.1	Menguatnya Kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran	Angka Melek Alqur'an	83 %
		3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Persentase dayah yang mandiri	38,00
		3.3	Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal	46,5
		3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	75,00
		3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	0,062
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan	4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama sekolah	14,49 9,71
		4.2	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	95,62
		4.3	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	92,67 65,48
		4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase pemuda berprestasi Persentase Atlet berprestasi	3,92 % 75,00 %
		4.5	Meningkatnya minat baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,31
		4.6	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup Persentase Balita Stunting Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	70,00 tahun 31,00% 10/1000 LH 194/100.000 LH

No	TUJUAN	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)		(2)	(3)	(4)
		4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Regional yang fungsional	20 %
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	85,30
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	91,57
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	82,50
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19	5.1	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,34
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,5
		5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal	70,75
		5.3	Pengendalian Inflasi	Laju inflasi	2,18 %
		5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,64
		5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Rasio UMKM yang diberdayakan	0,01
		5.6	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	31,13 %
		5.7	Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4 %
		5.8	Meningkatnya peran industri dan perdagangan	Persentase kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	4,53 %
		5.9	dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh	Pertumbuhan ekspor non migas	6 %
		5.10	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh	Nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp. 10,5 Miliar
		5.11	Meningkatnya sub kontribusi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,29 %
		5.12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	10 %
		5.13	Meningkatnya Kemandirian dan keragaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	74,27
		5.14	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64,43 %
				Rasio penduduk yang bekerja	97,18 %
6	Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan	6.1	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	84,42
				Rasio Konektivitas Daerah	0,73
		6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	70 %
		6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dlm kondisi baik	54,38 %
		6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis, dan infrastruktur pelayanan dasar	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	43,07 %

No	TUJUAN	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)		(2)	(3)	(4)
				Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	78 %
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	88 %
		6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,07
		6.6	Meningkatkan Pelestarian Hutan	Indeks kualitas lahan (IKL)	77,00
		6.7	Meningkatkan Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB)	145/Tinggi
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	7.1	Memitigasi munculnya potensi konflik horizontal	Pencegahan dan mitigasi konflik	0,857

Program

Anggaran

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.815.096.827.928
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.203.971.340.684
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	894.565.614
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.066.821.885
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	372.832.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	44.407.072
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.898.222.116
8	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	373.805.339.163
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.649.875.346
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	573.465.904
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.917.225.778
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	228.661.892.351
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.271.181.182
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.234.401.070
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	774.554.244.905
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.594.139.395
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	77.276.329.466
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.461.465.347
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	74.757.349.941
20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.804.257.150
21	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	113.200.859
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.867.483.856
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	195.291.537.482
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.538.130.458
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.096.562.705

26	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	336.147.436.865
27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.900.000.000
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.200.000.000
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	135.953.367.645
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.104.112.490
31	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	500.000.000
32	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	139.675.600.000
33	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	341.127.936.437
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.430.508.319
35	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.952.160.124
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.078.507.670
37	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	23.212.566.122
38	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.872.773.600
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.297.390.648
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.017.511.219
41	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	629.999.825
42	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	38.674.241.899
43	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10.048.761.042
44	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10.366.013.784
45	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.578.464.826
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.648.992.498
47	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	202.025.757
48	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.629.198.128
49	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	720.000.000
50	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.463.847.499
51	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.327.400.000
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.600.246.304
53	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	647.000.052
54	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.911.919.556
55	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	944.073.208
56	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	398.814.512
57	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.116.143.116
58	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	287.209.804
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.001.385.604
60	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.108.000.000
61	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	10.955.595.467
62	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.592.000.000
63	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.600.000.000
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.693.778.840
65	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	342.826.000
66	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	215.000.000

67	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	3.361.120.000
68	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	570.000.000
69	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	450.000.000
70	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	1.629.491.541
71	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	250.000.000
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85.644.381.631
73	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.035.647.800
74	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.515.000.000
75	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	80.000.000
76	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	130.000.000
77	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	391.286.130
78	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	50.000.000
79	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	350.000.000
80	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	202.242.000
81	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.509.100.000
82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.741.196.412
83	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.487.590.998
84	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.000.335.900
85	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.457.697.923
86	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	280.133.104
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.163.324.168
88	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	263.928.400
89	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.845.444.969
90	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.766.719.081
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.871.441.510
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	33.163.728.450
93	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	16.001.502.160
94	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.608.080.000
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.924.974.773
96	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.736.666.278
97	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	24.051.134.227
98	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	720.624.000
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	438.109.000
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.865.752.468
101	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	3.090.142.116
102	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.632.818.233
103	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.930.998.856
104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.616.456.155
105	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	38.402.932.450
106	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	26.886.150.990
107	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.593.926.176

108	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	507.199.614
109	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.381.999.430
110	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.093.728.145
111	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	990.354.060
112	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	431.072.200
113	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.586.125.450
114	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.600.000.000
115	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	115.693.654.539
116	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	8.700.000.000
117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.313.460.756
118	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	4.006.493.235
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.522.511.182
120	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	31.116.102.878
121	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	9.186.508.536
122	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.050.000.000
123	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.400.000.000
124	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	13.404.621.142
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	62.661.755.504
126	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	29.359.388.693
127	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	969.806.719
128	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	505.639.531
129	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	338.000.000
130	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.151.000.000
131	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	7.099.000.000
132	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	6.402.902.505
133	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	66.490.169.561
134	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	5.460.592.639
135	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.550.000.000
136	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	25.000.000
137	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	22.343.604.172
138	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	19.124.079.594
139	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	707.992.980
140	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.855.621.000
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.863.104.000
142	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.072.785.666
143	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	34.863.091.000
144	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.030.000.000
145	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.153.803.000
146	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.344.761.659
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96.983.015.000
148	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	60.112.344.000

149 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	607.400.000
150 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	9.547.839.800
151 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	936.022.000
152 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	15.383.754.000
153 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.577.506.077
154 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.536.626.486
155 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.591.307.917
156 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	5.607.620.333
157 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.187.175.402
158 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.588.495.228
159 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.051.000.000
160 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.220.000.000
161 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	51.788.648.766
162 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.737.179.247
163 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.366.186.266
164 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1.801.075.000
165 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	387.500.000
166 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	18.890.425.000
167 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	916.000.000
168 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.735.000.000
169 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.850.000.000
170 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.554.827.480
171 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	250.000.000
172 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	225.651.200
173 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	206.849.983.863
174 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.874.850.000
175 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.433.247.587
176 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.311.436.321
177 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	8.528.855.142
178 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.038.500.000
179 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.918.965.904
180 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.878.221.127
181 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.526.553.734
182 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	84.939.022.961
183 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.059.736.000
184 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	18.145.773.235
185 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.450.656.688
186 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.880.000.000
187 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	118.489.199.000
188 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.904.694.774.972
189 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.520.109.378

190	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	44.817.382.568
191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.862.825.035
192	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.922.729.965
193	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.402.809.191
194	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	80.495.581.254
195	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.595.111.064
196	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.104.888.936
197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.790.024.233
198	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.752.447.203
199	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.006.913.564
200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.242.962.304
201	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.784.241.063
202	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.826.200.000
203	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.866.300.000
204	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.929.400.000
205	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.591.314.700
206	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.028.368.409
207	PROGRAM REINTEGRASI ACEH	71.588.509.675
208	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.435.675.497
209	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	33.648.481.492
210	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.842.991.642
211	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	7.579.701.358
212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.984.172.988
213	PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	10.990.451.533
214	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.075.697.197
215	PROGRAM BAITUL MAL ACEH	214.670.119.188



PJ. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

The background features a large, flowing yellow shape that starts from the top left, curves around a central yellow circle, and then curves down towards the bottom right. The remaining areas are filled with a dark grey color.

**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH ACEH 2023**